

**KINERJA KEGIATAN PEMERIKSAAN
BPK PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018 DIAPRESIASI SANGAT MEMUASKAN**

Dalam rangka mengukur kepuasan pemangku kepentingan eksternal, dalam hal ini pihak *auditee* terhadap kinerja pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan survey kepada auditee setelah rangkaian kegiatan pemeriksaan berakhir. Parameter pengukuran kepuasan adalah nilai-nilai dasar BPK yang meliputi aspek independensi, integritas dan profesionalisme. Kepuasan auditee terhadap pemeriksaan BPK merupakan salah satu pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Perwakilan.

Kegiatan survey atas kepuasan *auditee* oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan pada Tahun Anggaran 2018, dengan cara mengedarkan kuesioner kepada *auditee*, dalam hal ini pihak pemerintah daerah, setelah pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Tahun Anggaran 2018 selesai dilaksanakan. Dalam survey ini, pengukuran parameter Independensi terdiri dari 9 pernyataan, parameter Integritas terdiri dari 7 pernyataan, dan parameter Profesionalisme terdiri dari 8 pernyataan. Pemerintah daerah memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda *cek list* atas setiap pernyataan dengan rentang penilaian meliputi “Tidak Memuaskan”, “Kurang Memuaskan”, “Cukup Memuaskan”, “Memuaskan” dan “Sangat Memuaskan”.

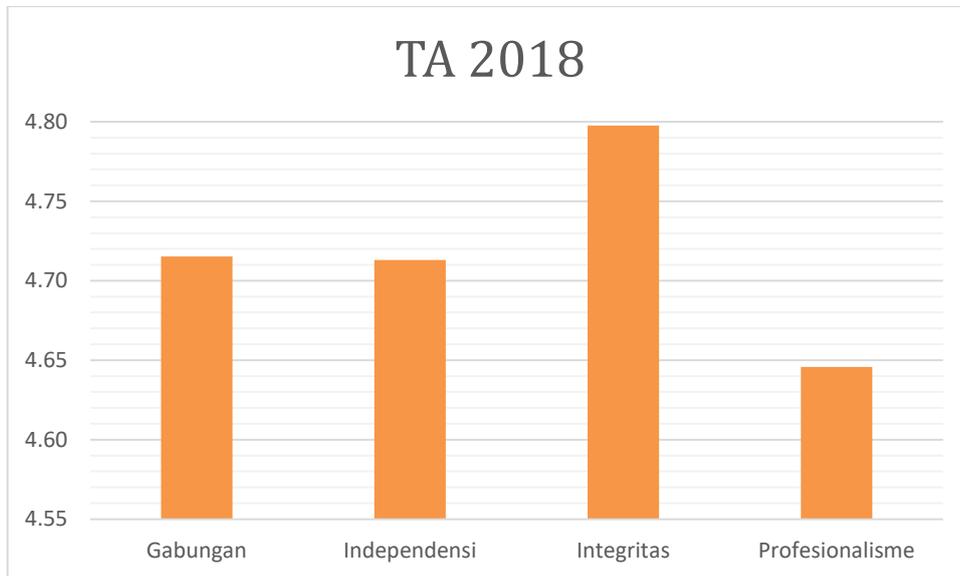
Kuesioner disampaikan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Barat kepada 24 entitas pemeriksaan yang terdiri dari 15 entitas pada pemeriksaan keuangan, 7 entitas pada pemeriksaan kinerja, dan 2 entitas pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kuesioner yang diedarkan telah diterima kembali seluruhnya. Kuesioner yang diterima, ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah. Selanjutnya, kuesioner ditabulasi dan dirata-rata baik secara gabungan, maupun secara parsial atas masing-masing parameter menggunakan skala penilaian 1 – 5, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai 1,00 s.d. 1,99 tergolong Sangat Tidak Memuaskan;
- b. Nilai 2,00 s.d. 2,99 tergolong Tidak Memuaskan;
- c. Nilai 3,00 s.d. 3,99 tergolong Memuaskan;
- d. Nilai 4,00 s.d. 5,00 tergolong Sangat Memuaskan.

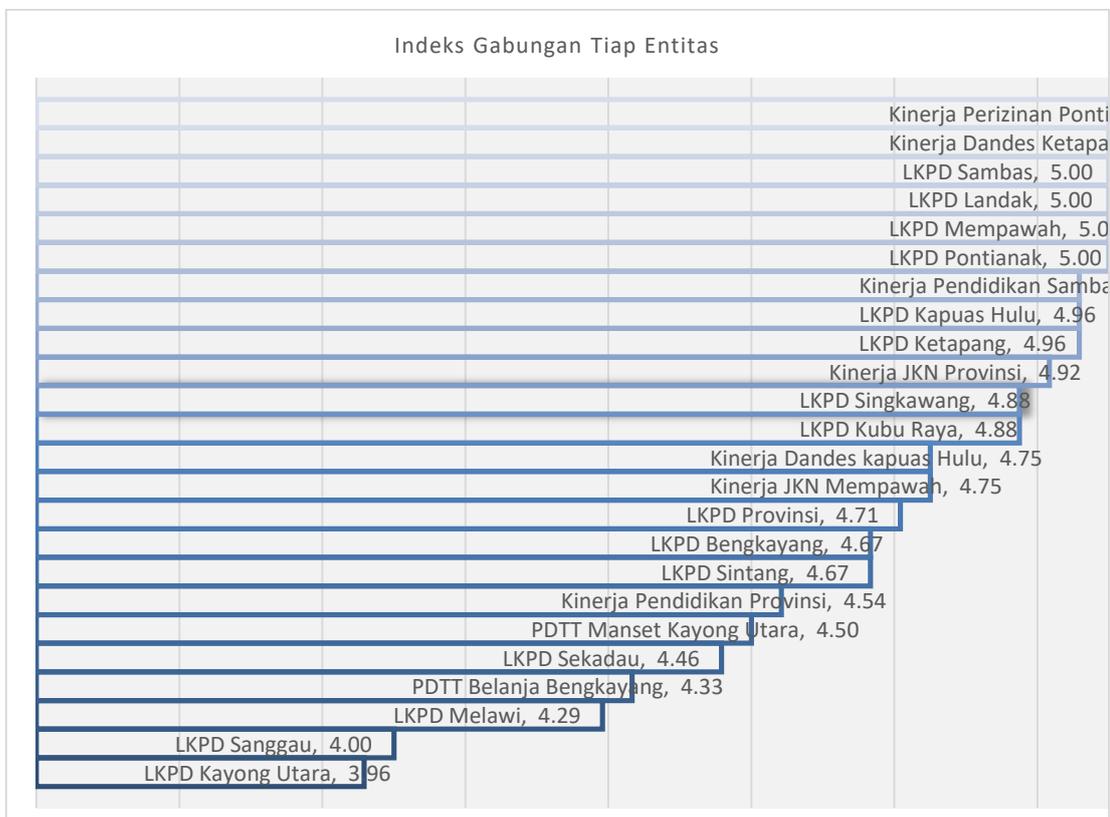
Hasil perhitungan gabungan terhadap kuesioner survei kepuasan *auditee* terhadap kinerja pemeriksaan BPK Perwakilan dari 24 entitas diperoleh nilai sebesar 4,72 sehingga tergolong Sangat Memuaskan. Kemudian secara parsial nilai masing-masing parameter tersebut sebagai berikut:

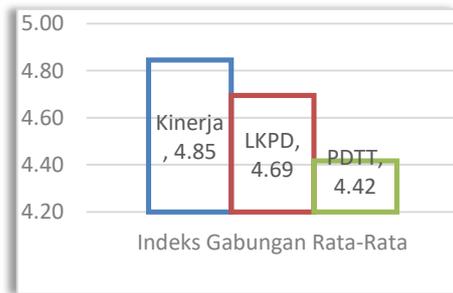
- a. Parameter Independensi diperoleh nilai sebesar 4,71, tergolong Sangat Memuaskan;
- b. Parameter Integritas diperoleh nilai sebesar 4,80, tergolong Sangat Memuaskan;

c. Parameter Profesionalisme diperoleh nilai sebesar 4,65, tergolong Sangat Memuaskan. Grafik atas hasil survei tersebut, tergambar dalam diagram sebagai berikut:



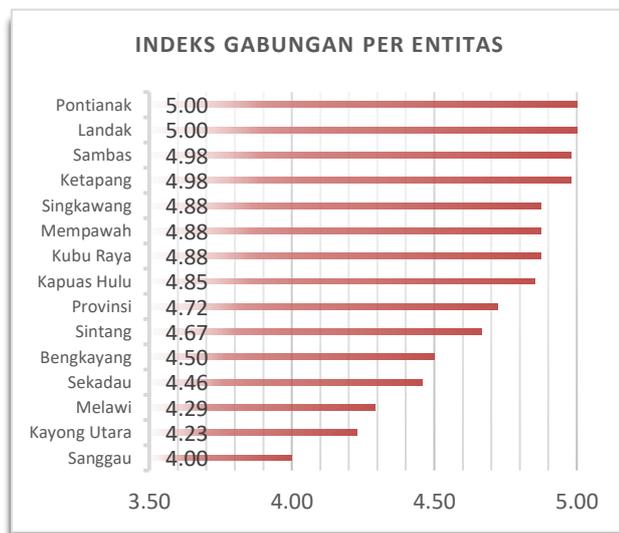
Berdasarkan grafik tersebut, walaupun semua parameter “Sangat Memuaskan”, terdapat pemeriksaan keuangan yang perlu ditingkatkan, yaitu pada Pemerintah Sanggau dengan indeks gabungan 4,00 dan Kayong Utara dengan indeks gabungan (total skor dibagi total soal) sebesar 3,96.





Berdasarkan jenis pemeriksaannya, rata-rata indeks gabungan menempatkan pemeriksaan kinerja sebagai pemeriksaan yang paling memberikan kepuasan bagi auditee, dan sebaliknya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan jenis pemeriksaan yang paling rendah.

Pemeriksaan keuangan, PDDT, dan kinerja pada Provinsi Kalimantan Barat hanya dilaksanakan terhadap 15 pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, selama TA 2018, dalam satu pemerintahan dapat terjadi hingga tiga kali pemeriksaan, yaitu di entitas Provinsi Kalimantan Barat. Dua kali pemeriksaan, yaitu pada Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Pontianak, Sambas. Tiga kali pemeriksaan, pada Kubu Raya, Landak, Melawi, Sanggau, Sekadau, Singkawang, Sintang. Indeks gabungan per entitas diperoleh



dengan merataratakan setiap indeks terhadap banyaknya pemeriksaan yang dilaksanakan pada masing-masing pemerintah daerah. Hasil yang diperoleh adalah terdapat lima entitas yang tidak memperoleh kepuasan di atas 4,50. Secara urut dari yang terendah adalah Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sekadau, dan Bengkayang. Tiga di antaranya masih belum WTP, yakni Melawi, Kayong Utara, dan Bengkayang. Sedangkan, satu daerah lain yang masih WDP, yaitu Sambas, justru ada pada peringkat ketiga terpuas.

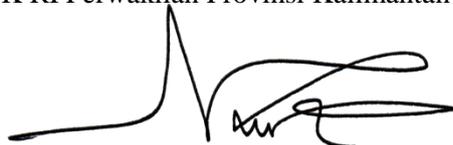
Dari 24 pernyataan, lima pernyataan dengan nilai terendah adalah berhubungan dengan penggunaan istilah yang menimbulkan multi tafsir, kemampuan auditor, dan ketepatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan, sikap tegas, dan maanfaat LHP bagi fungsi pengawasan oleh pemda. Dari kelima pernyataan, terdapat tiga unsur parameter profesionalime, satu parameter independensi, dan satu integritas.

<i>Parameter</i>	<i>Pernyataan</i>	<i>Total Nilai</i>	<i>Indeks</i>
<i>Independensi</i>	Pemeriksaan bebas dari bahasa atau istilah-istilah yang menimbulkan multi tafsir	108	4,50
<i>Profesionalisme</i>	Pemeriksa memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis teori organisasi, auditing, akuntansi, dan pengetahuan tentang sektor publik yang memadai dalam melakukan pemeriksaan	109	4,54
<i>Profesionalisme</i>	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	110	4,58
<i>Integritas</i>	Pemeriksa bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan	111	4,63
<i>Profesionalisme</i>	Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk membantu fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah	111	4,63

Dari hasil di atas, diketahui bahwa BPK perlu melakukan perbaikan-perbaikan, khususnya pada parameter profesionalisme dan pendekatan lebih baik kepada tiga entitas. Langkah yang akan diambil di antaranya meningkatkan diklat dan pendidikan berkelanjutan yang minimal sesuai tuntutan profesi, penjadwalan waktu pemeriksaan dan peningkatan rekomendasi yang membantu fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah. Peningkatan kualitas temuan dan LHP juga akan diperbaiki guna mengurangi kemungkinan salah tafsir oleh *stakeholder*. Pendekatan lebih oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bagi ketiga entitas yang masih WDP dan memiliki kepuasan relatif rendah dibanding lainnya, yakni Melawi, Kayong Utara, dan Bengkayang. Tindakan ini dapat dilaksanakan sebagai salah satu upaya perbaikan pengelolaan keuangan pada ketiga entitas tersebut untuk segera mencapai WTP.

Pontianak, April 2019

Ketua Pusat Informasi dan Komunikasi
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



Wizar Dien Yatim S.E., M.M., Ak.

NIP 197302241998031004